

REKONSTRUKSI TEORI KOMUNIKASI DALAM MENGHADAPI DISINFORMASI DIGITAL: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS

Heri Wahyudi Marpaung^{1✉}, Mailin²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2}

heri4004243025@uinsu.ac.id¹, mailin@uinsu.ac.id²

Received: 2025-10-26; Accepted: 2025-11-15; Published: 2025-12-25

Abstract : This study aims to: 1) identify the development of communication theory in the context of digital disinformation; 2) analyze the limitations of classical communication theory in explaining the phenomenon of algorithm-based communication; and 3) formulate a framework for reconstructing communication theory that is more adaptive to contemporary challenges. The study uses a qualitative approach with the Systematic Literature Review (SLR) method based on the PRISMA protocol for indexed articles from 2015–2024. The analysis is conducted through a thematic approach to map conceptual transformations in digital communication studies. The results of the study indicate that: 1) A paradigm shift from linear communication to multidirectional and decentralized networked communication; 2) Classical communication theories such as agenda setting, Two-step flow, and the spiral of silence have limitations because they have not integrated the role of algorithms, platforms, and non-human actors in the communication process; and 3) A framework for reconstructing communication theory that is based on three main principles: network communication, the integration of algorithms as non-human communication actors, and strengthening digital literacy. The resulting model includes four main components: human actors, algorithmic actors, platform structures, and socio-political contexts that interact in shaping the circulation of digital information. This reconstruction is expected to enrich the development of digital communication theory and serve as a conceptual basis for mitigating disinformation in the era of platformization and artificial intelligence.

Keywords: *Organizational communication theory, Digitalization, Information Disruption, Digital Platforms, Systematic Literature Review*

Copyright © 2025, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



DOI: <https://doi.org/10.47453/>

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mentransformasi lanskap komunikasi global secara fundamental. Internet, media sosial, dan platform berbasis algoritma memungkinkan arus informasi bergerak melampaui batas geografis dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Transformasi ini bukan sekadar perubahan teknologis, melainkan perubahan struktural dalam cara manusia memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi informasi. Kehadiran media digital mendorong terbentuknya ruang publik baru yang lebih terbuka dan partisipatif, di mana setiap individu dapat menjadi produsen sekaligus distributor informasi. Fenomena ini sering dipandang sebagai bentuk demokratisasi komunikasi yang memperluas akses publik terhadap informasi dan memperkuat partisipasi warga dalam diskursus sosial-politik (Bennett & Segerberg, 2012; Castells, 2015).

Namun, optimisme terhadap demokratisasi digital tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas empiris. Ekosistem komunikasi digital juga memunculkan persoalan serius berupa meningkatnya praktik disinformasi yang terorganisir, sistematis, dan sering kali didorong oleh kepentingan politik maupun ekonomi. Laporan dari World Economic Forum tahun 2024 menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai salah satu risiko global paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena dampaknya terhadap stabilitas politik, kohesi sosial, dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi (Forum, n.d.). Disinformasi tidak lagi dipahami sebagai sekadar kesalahan informasi, melainkan sebagai praktik manipulatif yang disengaja untuk memengaruhi opini publik, menciptakan polarisasi, serta mengganggu proses demokrasi (Wardle & Derakhshan, 2017). Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis yang terjadi bukan sekadar krisis informasi, tetapi krisis komunikasi dalam struktur digital kontemporer yang semakin kompleks.

Dalam konteks komunikasi, teori-teori klasik seperti agenda setting (McCombs & Shaw), spiral of silence (Noelle-Neumann), Two-step flow of communication (Lazarsfeld & Katz), dan hypodermic needle theory berkembang dalam era media massa konvensional yang memiliki karakteristik sentralistik, hierarkis, dan relatif terkontrol. Teori agenda setting, misalnya, menjelaskan bagaimana media memengaruhi persepsi publik tentang isu-isu yang dianggap penting. Spiral of silence menggambarkan kecenderungan individu untuk diam ketika merasa opini mereka berbeda dari opini dominan. Two-step flow menekankan peran opinion leader dalam memediasi pesan media kepada khalayak. Seluruh teori tersebut berangkat dari asumsi adanya struktur media yang jelas, relasi komunikator–komunikan yang relatif stabil, serta arus informasi yang cenderung linear.

Namun, realitas komunikasi digital hari ini memperlihatkan perubahan mendasar. Platform seperti Facebook, X, dan YouTube tidak lagi sekadar menjadi medium distribusi pesan, tetapi bertindak sebagai aktor algoritmik yang menentukan visibilitas, prioritas, dan sirkulasi informasi melalui sistem rekomendasi berbasis data. Algoritma personalisasi memungkinkan setiap pengguna menerima konten yang berbeda berdasarkan preferensi dan perilaku daring mereka. Praktik micro-targeting politik bahkan memungkinkan pesan yang sangat spesifik dikirimkan kepada kelompok tertentu untuk memengaruhi pilihan politik (Tufekci, 2015). Dalam konteks ini, media bukan lagi sekadar saluran komunikasi, melainkan infrastruktur algoritmik yang memiliki daya kendali signifikan terhadap pembentukan opini publik.

Fenomena echo chamber dan filter bubble semakin memperkuat fragmentasi ruang publik. Individu cenderung terpapar pada informasi yang sejalan dengan preferensi dan keyakinan mereka, sehingga memperkuat polarisasi sosial dan politik (Pariser, 2011; Sunstein, 2018). Dalam situasi ini, asumsi linearitas komunikasi dalam teori klasik menjadi kurang memadai. Relasi komunikasi kini melibatkan interaksi kompleks antara manusia, algoritma, bot digital, serta sistem kecerdasan buatan. Disinformasi dapat diproduksi secara otomatis, disebarkan melalui jaringan bot, dan diperkuat oleh sistem rekomendasi yang mengutamakan engagement dibanding akurasi informasi. (Bradshaw & Howard, 2019) Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka teoretis komunikasi klasik menghadapi keterbatasan dalam menjelaskan kompleksitas relasi manusia-mesin dalam produksi dan distribusi informasi digital.

Secara umum, kajian disinformasi dalam lima tahun terakhir berkembang pesat. Penelitian banyak menyoroti dampak sosial-politik disinformasi, strategi fact-checking, literasi digital, serta regulasi platform. Konsep seperti information disorder, (Wardle & Derakhshan, 2017) computational propaganda, (Bradshaw & Howard, 2019) post-truth politics, (McIntyre, 2018) dan deep mediatization Couldry & Hepp, memperkaya diskursus akademik. (Couldry & Hepp, 2017) Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut bersifat empiris-deskriptif dan belum secara mendalam melakukan rekonstruksi terhadap fondasi teori komunikasi. Konsep-konsep baru tersebut sering kali berdiri secara parsial tanpa integrasi sistematis dengan teori komunikasi klasik yang telah mapan.

Berdasarkan observasi awal terhadap literatur ilmiah, ditemukan adanya kecenderungan penggunaan teori komunikasi klasik secara repetitif tanpa adaptasi konseptual yang memadai terhadap konteks digital. Agenda setting misalnya masih sering digunakan untuk menjelaskan pembentukan opini publik di media sosial, tanpa mempertimbangkan peran algoritma sebagai aktor non-manusia yang memediasi visibilitas isu. Demikian pula, konsep opinion leader dalam Two-step flow belum sepenuhnya diperluas untuk memasukkan peran influencer digital dan sistem rekomendasi otomatis. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggunakan pendekatan Systematic Literature Review untuk secara kritis memetakan perkembangan teori komunikasi dalam menghadapi disinformasi digital. Padahal, pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola konseptual, evaluasi konsistensi teoretis, serta perumusan kerangka rekonstruksi yang lebih integratif. (Snyder, 2019)

Penelitian-penelitian terdahulu memang telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika disinformasi. Bennett dan Livingston mengemukakan konsep “disinformation order” untuk menjelaskan perubahan struktur komunikasi politik dalam demokrasi digital. (Bennett & Livingston, 2018) Wardle dan Derakhshan mengembangkan tipologi misinformasi, disinformasi, dan malinformasi sebagai dasar klasifikasi fenomena informasi yang menyimpang. (Wardle & Derakhshan, 2017) Bradshaw dan Howard (2019) menyoroti skala global propaganda komputasional dan penggunaan bot dalam manipulasi opini publik. (Bradshaw & Howard, 2019) Couldry dan Hepp memperkenalkan konsep deep mediatization sebagai bentuk transformasi komunikasi yang semakin terdigitalisasi. (Couldry & Hepp, 2017) Meskipun demikian, belum terdapat kajian yang secara sistematis merekonstruksi teori komunikasi klasik agar relevan dalam menghadapi tantangan disinformasi berbasis algoritma dan artificial intelligence.

Dengan demikian, terdapat beberapa research gap yang dapat diidentifikasi. Pertama, gap konseptual berupa belum adanya model teoretis integratif yang

menyatukan teori komunikasi klasik dengan dinamika platform digital berbasis algoritma. Kedua, gap metodologis berupa minimnya penggunaan Systematic Literature Review untuk memetakan transformasi teori komunikasi secara komprehensif. Ketiga, gap integratif berupa kurangnya sintesis antara konsep-konsep baru seperti computational propaganda dan deep mediatization dengan kerangka teori komunikasi yang lebih luas. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif dan rekonstruktif secara teoretis.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, rekonstruksi teori komunikasi menjadi kebutuhan akademik yang mendesak. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan teori klasik, melainkan untuk mereposisi dan mengembangkan kembali asumsi-asumsi dasarnya agar sesuai dengan konteks komunikasi jaringan (networked communication), platformisasi media, serta interaksi manusia–mesin yang semakin intensif. Teori komunikasi perlu diperluas untuk memasukkan dimensi algoritma, artificial intelligence, datafikasi, dan ekonomi perhatian sebagai variabel penting dalam proses komunikasi kontemporer. (Couldry & Mejias, 2019) Melalui pendekatan Systematic Literature Review, penelitian ini berupaya mengidentifikasi perkembangan teoretis yang relevan, menganalisis keterbatasan teori klasik, serta merumuskan kerangka konseptual baru yang adaptif terhadap disinformasi digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan teori komunikasi dalam konteks disinformasi digital melalui tinjauan literatur sistematis, menganalisis keterbatasan teori komunikasi klasik dalam menjelaskan fenomena komunikasi digital berbasis algoritma, serta merumuskan kerangka rekonstruksi teori komunikasi yang lebih relevan dan adaptif terhadap tantangan disinformasi kontemporer. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori komunikasi digital dan memperkaya khazanah kajian komunikasi kontemporer. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi dasar penguatan literasi digital, pengembangan kebijakan komunikasi publik, serta perumusan strategi mitigasi disinformasi dalam ruang publik digital yang semakin kompleks.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis dan merekonstruksi teori komunikasi dalam menghadapi disinformasi digital. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada sintesis konseptual dan pengembangan kerangka teoretis, bukan pada pengujian hipotesis empiris. Systematic Literature Review memungkinkan proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. (Snyder, 2019; Van Barneveld et al., 2019)

Desain penelitian mengacu pada protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang meliputi tahap identifikasi, screening, eligibility, dan inklusi artikel. (Page et al., 2021) Sumber data diperoleh dari database bereputasi seperti Scopus, Web of Science, SpringerLink, Taylor & Francis, Sage Journals, dan Google Scholar terindeks, dengan rentang publikasi 2015–2024 agar relevan dengan perkembangan komunikasi digital dan disinformasi berbasis algoritma.

Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci seperti “communication theory”, “digital disinformation”, “algorithmic communication”, “computational propaganda”, dan “deep mediatization” dengan operator Boolean (AND/OR). Artikel

yang diinklusi adalah jurnal ilmiah terindeks yang memiliki kerangka teori jelas dan relevan dengan isu komunikasi digital. Artikel opini, duplikasi, atau yang tidak memiliki landasan teoretis yang memadai dieliminasi dari proses seleksi.

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik dengan tahapan open coding, axial coding, dan selective coding. (Braun & Clarke, 2006) Analisis difokuskan pada tiga aspek utama: (1) keterbatasan teori komunikasi klasik dalam menjelaskan komunikasi digital, (2) integrasi konsep baru seperti algorithmic mediation dan computational propaganda, serta (3) perumusan model rekonstruksi teori komunikasi berbasis jaringan (networked communication).

Untuk menjaga kredibilitas penelitian, dilakukan dokumentasi sistematis proses seleksi literatur (audit trail) dan triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi temuan. (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003) Hasil akhir penelitian berupa sintesis konseptual dan model rekonstruksi teori komunikasi yang adaptif terhadap disinformasi digital dalam ekosistem platform berbasis algoritma.

Hasil dan Pembahasan

Hasil tinjauan literatur sistematis menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir teori komunikasi mengalami transformasi epistemologis yang signifikan sebagai respons terhadap meningkatnya fenomena disinformasi digital. Jika pada era media massa teori komunikasi berkembang dalam kerangka struktural yang relatif stabil dan terpusat, maka pada era digital struktur komunikasi berubah menjadi terdesentralisasi, dinamis, dan berbasis jaringan. Pergeseran ini tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga konseptual, karena memengaruhi asumsi dasar tentang aktor, medium, pesan, serta proses pembentukan opini publik. (Castells, 2015; Couldry & Hepp, 2017).

Pada era media massa, komunikasi dipahami sebagai proses linear yang bergerak dari komunikator ke komunikan melalui saluran tertentu. Model Shannon dan Weaver serta pengembangan teori efek media menempatkan pesan sebagai pusat analisis dan media sebagai saluran distribusi. Agenda setting, misalnya, menjelaskan bagaimana media menentukan isu yang dianggap penting oleh publik melalui proses seleksi dan penonjolan berita. (McCombs & Shaw, 1972) Namun dalam konteks digital, asumsi linearitas tersebut mengalami erosi. Komunikasi tidak lagi bergerak satu arah, melainkan berlangsung secara multidireksional dalam jaringan yang kompleks. Individu bukan hanya penerima pesan, tetapi juga produsen konten (prosumer), sehingga batas antara komunikator dan komunikan menjadi kabur. (Castells, 2015).

Perkembangan ini semakin kompleks ketika infrastruktur algoritmik platform digital ikut berperan dalam menentukan arus informasi. Literatur mutakhir menegaskan bahwa komunikasi digital dimediasi oleh sistem rekomendasi, logika personalisasi, dan ekonomi perhatian yang mengutamakan engagement dibanding akurasi. (Tufekci, 2015) Dengan demikian, komunikasi tidak lagi sekadar interaksi antarindividu, tetapi interaksi antara manusia, algoritma, dan sistem kecerdasan buatan. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari media massa menuju komunikasi berbasis jaringan (networked communication).

Dalam konteks disinformasi digital, literatur menunjukkan munculnya sejumlah konsep baru yang memperluas cakupan teori komunikasi. Wardle dan Derakhshan memperkenalkan konsep information disorder untuk mengklasifikasikan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. (Wardle & Derakhshan, 2017) Klasifikasi ini penting karena membedakan antara kesalahan informasi yang tidak disengaja dan manipulasi

informasi yang dirancang secara sistematis. Konsep tersebut menandai perluasan analisis komunikasi dari sekadar efek pesan menuju analisis struktur produksi dan distribusi informasi.

Selanjutnya, Bennett dan Livingston mengembangkan konsep *disinformation order* untuk menjelaskan bagaimana sistem komunikasi politik mengalami perubahan akibat fragmentasi digital dan melemahnya otoritas media arus utama. (Bennett & Livingston, 2018) Dalam era digital, legitimasi informasi tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh institusi jurnalistik, tetapi oleh dinamika jaringan sosial dan algoritma platform. Hal ini menghasilkan kondisi di mana informasi palsu dapat bersirkulasi dengan legitimasi yang setara atau bahkan lebih tinggi dibanding informasi faktual.

Konsep *computational propaganda* yang dikemukakan oleh Bradshaw dan Howard semakin memperluas kerangka teori komunikasi dengan menekankan peran otomatisasi, bot digital, dan *artificial intelligence* dalam penyebaran disinformasi. (Bradshaw & Howard, 2019) Disinformasi tidak lagi diproduksi secara manual oleh individu, tetapi dapat direplikasi dan diperkuat secara sistematis melalui jaringan bot. Fenomena ini menunjukkan bahwa aktor komunikasi dalam era digital mencakup entitas non-manusia yang memiliki kapasitas produksi dan distribusi pesan dalam skala masif.

Selain itu, konsep *deep mediatization* yang diperkenalkan oleh Couldry dan Hepp menegaskan bahwa seluruh dimensi kehidupan sosial semakin terdigitalisasi dan dimediasi oleh infrastruktur komunikasi berbasis data. Komunikasi tidak hanya berlangsung melalui media, tetapi berada dalam kondisi *mediatization* yang mendalam, di mana praktik sosial, politik, dan ekonomi terintegrasi dengan logika platform digital. Dalam konteks ini, komunikasi dipahami sebagai proses yang tidak dapat dipisahkan dari struktur teknologi yang mengorganisasikannya.

Perkembangan teori komunikasi juga menunjukkan munculnya perspektif *platform society* yang menekankan bahwa platform digital berfungsi sebagai arsitektur sosial yang mengatur interaksi publik. (Van Dijck, Poell, & De Waal, 2018) Platform bukan sekadar medium netral, melainkan institusi yang memiliki kekuasaan dalam mengatur visibilitas informasi, memprioritaskan konten tertentu, serta membentuk pola interaksi sosial. Dengan demikian, teori komunikasi kontemporer perlu memasukkan dimensi struktural platform sebagai variabel kunci dalam analisis.

Lebih lanjut, Couldry dan Mejias memperkenalkan konsep *datafikasi* yang menekankan bahwa komunikasi digital menghasilkan dan memanfaatkan data sebagai sumber kekuasaan baru. Proses komunikasi tidak hanya menghasilkan pesan, tetapi juga data perilaku yang digunakan untuk mengoptimalkan distribusi konten. Dalam konteks disinformasi, datafikasi memungkinkan segmentasi audiens secara presisi melalui *micro-targeting* politik, sehingga memperbesar efektivitas manipulasi opini publik.

Dari hasil sintesis literatur, dapat diidentifikasi tiga tren utama dalam perkembangan teori komunikasi terkait disinformasi digital. Pertama, terjadi pergeseran dari paradigma linear menuju paradigma jaringan. Komunikasi dipahami sebagai proses relasional yang berlangsung dalam struktur jaringan multidireksional. Kedua, integrasi dimensi algoritma dan *artificial intelligence* dalam proses komunikasi. Algoritma diposisikan sebagai mediator aktif yang membentuk distribusi informasi. Ketiga, perluasan konsep aktor komunikasi yang mencakup entitas non-manusia seperti bot dan sistem rekomendasi otomatis.

Namun demikian, perkembangan tersebut masih bersifat parsial. Banyak penelitian memperkenalkan konsep baru tanpa sepenuhnya mengintegrasikannya dalam kerangka teori komunikasi yang mapan. Sebagian literatur masih menggunakan teori klasik sebagai kerangka analisis tanpa melakukan adaptasi konseptual yang memadai terhadap realitas digital. Akibatnya, diskursus akademik mengenai komunikasi digital dan disinformasi cenderung terfragmentasi dan belum menghasilkan model teoretis komprehensif yang mampu menjelaskan kompleksitas relasi manusia–mesin dalam ekosistem komunikasi kontemporer.

Dengan demikian, perkembangan teori komunikasi dalam konteks disinformasi digital menunjukkan adanya transformasi paradigma yang signifikan, namun belum sepenuhnya terkonsolidasi dalam kerangka teoretis integratif. Pergeseran dari linearitas menuju jaringan, integrasi algoritma sebagai aktor komunikasi, serta pengakuan terhadap platformisasi dan datafikasi merupakan fondasi penting bagi upaya rekonstruksi teori komunikasi di era digital. Transformasi ini menegaskan bahwa studi komunikasi tidak lagi dapat bertumpu pada asumsi media massa konvensional, melainkan harus mengakomodasi kompleksitas ekosistem komunikasi berbasis algoritma dan artificial intelligence yang mendefinisikan ruang publik kontemporer.

Keterbatasan Teori Komunikasi Klasik dalam Era Algoritma

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa teori komunikasi klasik menghadapi keterbatasan struktural dan epistemologis dalam menjelaskan fenomena komunikasi digital berbasis algoritma. Teori-teori yang berkembang pada era media massa konvensional dirancang dalam konteks sistem komunikasi yang relatif terpusat, hierarkis, dan dikendalikan oleh institusi media. Dalam sistem tersebut, media berperan sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*), sementara khalayak diposisikan sebagai penerima pesan yang relatif pasif atau semi-aktif. Namun, realitas komunikasi digital kontemporer memperlihatkan bahwa struktur tersebut telah mengalami disrupsi mendasar akibat kehadiran platform digital dan sistem algoritmik.

Salah satu contoh paling jelas dapat dilihat pada teori agenda setting. McCombs dan Shaw menyatakan bahwa media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan oleh publik, tetapi menentukan apa yang harus dipikirkan tentang (*what to think about*). (McCombs & Shaw, 1972) Teori ini menempatkan media sebagai aktor utama dalam pembentukan agenda publik melalui seleksi dan penonjolan isu. Namun dalam ekosistem digital, fungsi penentuan agenda tidak lagi sepenuhnya berada di tangan redaksi media. Algoritma platform digital berperan sebagai sistem kurasi otomatis yang menentukan visibilitas konten berdasarkan logika personalisasi dan ekonomi perhatian. (Tufekci, 2015) Dengan demikian, agenda publik tidak hanya dibentuk oleh pertimbangan editorial, tetapi juga oleh sistem rekomendasi berbasis data yang beroperasi secara non-transparan.

Dalam konteks ini, logika *attention economy* menjadi faktor dominan. Konten yang menghasilkan keterlibatan tinggi seperti klik, komentar, dan berbagi cenderung diprioritaskan oleh algoritma. Disinformasi sering kali dirancang secara emosional dan provokatif sehingga memiliki potensi engagement lebih besar dibanding informasi faktual yang bersifat netral. Akibatnya, mekanisme algoritmik secara tidak langsung memperbesar peluang penyebaran disinformasi. Teori agenda setting klasik tidak mengantisipasi keberadaan aktor non-manusia yang secara sistematis memediasi

visibilitas isu. Dengan demikian, asumsi dasar teori tersebut menjadi kurang memadai dalam menjelaskan pembentukan agenda publik pada era platformisasi.

Keterbatasan serupa juga tampak pada teori Two-step flow of communication yang dikembangkan oleh Lazarsfeld dan Katz. Teori ini menekankan bahwa pengaruh media terhadap khalayak dimediasi oleh opinion leader yang memiliki otoritas sosial dalam komunitas tertentu. Dalam konteks media massa, opinion leader dipahami sebagai individu yang memiliki akses lebih luas terhadap informasi dan memengaruhi opini kelompoknya. Namun dalam lingkungan digital, peran mediasi tersebut tidak lagi terbatas pada individu manusia. Sistem rekomendasi otomatis, trending topic, serta influencer yang bekerja dalam ekosistem algoritmik turut berperan sebagai mediator informasi.

Influencer digital, misalnya, tidak hanya membangun pengaruh melalui relasi sosial langsung, tetapi juga melalui optimasi algoritma platform. Konten yang sesuai dengan preferensi algoritmik memiliki peluang lebih besar untuk tersebar luas. Selain itu, algoritma itu sendiri berfungsi sebagai “opinion leader sistemik” yang menentukan konten apa yang muncul dalam linimasa pengguna. Dengan demikian, teori Two-step flow yang menekankan mediasi interpersonal perlu diperluas untuk memasukkan mediasi algoritmik sebagai bagian integral dari proses komunikasi.

Teori spiral of silence yang dikemukakan oleh Noelle-Neumann juga menghadapi keterbatasan dalam era digital. Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung diam ketika merasa opininya berbeda dari opini dominan karena takut terisolasi secara sosial. Namun media sosial memungkinkan terbentuknya komunitas homogen yang memperkuat keyakinan kolektif, sehingga opini yang minoritas dalam ruang publik luas dapat menjadi mayoritas dalam ruang digital tertentu. (Sunstein, 2018) Fenomena echo chamber dan filter bubble memperlihatkan bahwa persepsi terhadap opini dominan bersifat relatif dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan algoritmik pengguna. Dalam kondisi ini, spiral of silence tidak lagi berlangsung dalam ruang publik tunggal, melainkan dalam ruang-ruang digital terfragmentasi.

Lebih jauh, teori komunikasi klasik umumnya dibangun atas asumsi aktor manusia sebagai pusat proses komunikasi. Komunikasi dipahami sebagai interaksi simbolik antarindividu atau kelompok sosial. Namun dalam realitas digital, komunikasi dimediasi oleh bot, artificial intelligence, serta sistem otomatis yang dapat mereplikasi dan memperkuat pesan dalam skala masif. (Bradshaw & Howard, 2019) Bot digital mampu menciptakan ilusi dukungan publik terhadap suatu isu, sehingga memengaruhi persepsi legitimasi sosial. Dalam konteks ini, batas antara komunikasi organik dan komunikasi terotomatisasi menjadi kabur.

Kehadiran artificial intelligence dalam produksi dan distribusi konten semakin memperdalam kompleksitas tersebut. Sistem generative AI dapat menghasilkan teks, gambar, dan video yang menyerupai produksi manusia, sehingga memperluas potensi manipulasi informasi. Teori komunikasi klasik tidak dirancang untuk menjelaskan proses komunikasi yang melibatkan entitas non-manusia dengan kapasitas produksi simbolik. Dengan demikian, terdapat kesenjangan ontologis antara asumsi teori klasik dan realitas komunikasi berbasis algoritma.

Selain itu, teori komunikasi klasik umumnya beroperasi dalam paradigma normatif yang mengandaikan adanya pemisahan jelas antara produsen dan konsumen informasi. Dalam ekosistem digital, pengguna sekaligus menjadi produsen (prosumer), sementara platform mengumpulkan dan memonetisasi data interaksi mereka. (Couldry & Mejias, 2019) Proses datafikasi ini mengubah komunikasi menjadi sumber nilai

ekonomi. Disinformasi tidak hanya berfungsi sebagai alat manipulasi politik, tetapi juga sebagai komoditas yang menghasilkan pendapatan melalui klik dan iklan. Dimensi ekonomi ini jarang menjadi fokus dalam teori komunikasi klasik.

Keterbatasan lain terletak pada kurangnya perhatian terhadap dimensi struktural platform. Teori klasik lebih menekankan isi pesan dan efek terhadap khalayak, sementara arsitektur teknologi yang mengatur distribusi pesan jarang dianalisis secara mendalam. Dalam konteks digital, struktur platform menentukan kemungkinan interaksi, kecepatan penyebaran informasi, serta pola polarisasi sosial. (Van Dijck et al., 2018) Dengan demikian, tanpa memasukkan analisis terhadap struktur platform dan logika algoritma, teori komunikasi menjadi kurang komprehensif.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan epistemologis antara asumsi teori komunikasi konvensional dan realitas komunikasi digital berbasis platform. Asumsi linearitas, sentralisasi media, aktor manusia tunggal, serta netralitas saluran komunikasi tidak lagi sepenuhnya relevan. Komunikasi digital merupakan sistem kompleks yang melibatkan interaksi simultan antara manusia, mesin, data, dan struktur ekonomi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi teoretis yang mampu mengakomodasi kompleksitas interaksi manusia–mesin dalam ekosistem komunikasi kontemporer. Rekonstruksi tersebut perlu memperluas konsep aktor komunikasi, mengintegrasikan dimensi algoritma sebagai mediator aktif, serta mempertimbangkan logika ekonomi perhatian dan datafikasi sebagai variabel kunci dalam analisis komunikasi. Tanpa langkah tersebut, teori komunikasi akan terus tertinggal dalam menjelaskan dinamika disinformasi digital yang semakin canggih dan terotomatisasi.

Dengan demikian, keterbatasan teori komunikasi klasik bukan berarti teori tersebut tidak relevan, melainkan menunjukkan perlunya adaptasi konseptual agar selaras dengan perubahan struktural dalam lanskap komunikasi global. Era algoritma menuntut teori komunikasi yang tidak hanya memahami relasi antarindividu, tetapi juga relasi antara manusia, mesin, dan struktur platform dalam membentuk realitas sosial kontemporer.

Kerangka Rekonstruksi Teori Komunikasi yang Adaptif

Berdasarkan sintesis literatur yang telah dilakukan, penelitian ini merumuskan kerangka rekonstruksi teori komunikasi yang lebih relevan dalam menghadapi tantangan disinformasi digital. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan teori komunikasi klasik secara total, melainkan untuk memperluas dan mereposisi asumsi dasarnya agar sesuai dengan karakteristik komunikasi berbasis platform dan algoritma. Perubahan struktur komunikasi global yang ditandai oleh platformisasi, datafikasi, dan artificial intelligence menuntut pembaruan epistemologis dalam memahami relasi antara aktor, medium, dan kekuasaan dalam proses komunikasi. (Couldry & Hepp, 2017; Couldry & Mejias, 2019)

Rekonstruksi teori komunikasi dalam penelitian ini bertumpu pada tiga prinsip utama. Prinsip pertama adalah komunikasi jaringan (*networked communication*). Perspektif ini berangkat dari pemikiran bahwa komunikasi kontemporer berlangsung dalam struktur jaringan yang terdesentralisasi dan multidireksional. (Castells, 2015) Dalam model ini, komunikasi tidak lagi dipahami sebagai arus linear dari komunikator ke komunikan, melainkan sebagai proses dinamis yang melibatkan interaksi simultan antara individu, komunitas, dan sistem teknologi. Jaringan digital memungkinkan

pesan menyebar secara viral melalui konektivitas horizontal, bukan semata-mata melalui otoritas vertikal seperti pada era media massa.

Paradigma komunikasi jaringan menekankan bahwa kekuasaan komunikasi berada dalam struktur relasional jaringan itu sendiri. Aktor yang memiliki posisi strategis dalam jaringan baik individu, kelompok, maupun entitas algoritmik memiliki kapasitas lebih besar dalam memengaruhi sirkulasi informasi. Dalam konteks disinformasi, struktur jaringan memungkinkan konten manipulatif menyebar dengan cepat melalui mekanisme berbagi dan amplifikasi kolektif. Oleh karena itu, teori komunikasi yang adaptif harus memahami pola konektivitas, dinamika viralitas, serta mekanisme reproduksi informasi dalam jaringan digital.

Prinsip kedua adalah integrasi algoritma sebagai aktor komunikasi non-manusia. Dalam ekosistem platform digital, algoritma tidak sekadar berfungsi sebagai alat teknis, tetapi sebagai agen mediasi yang menentukan visibilitas, prioritas, dan distribusi konten. Perspektif platform society menegaskan bahwa platform digital membentuk arsitektur komunikasi publik melalui desain algoritmiknya. (Van Dijck et al., 2018) Algoritma bekerja berdasarkan logika personalisasi dan ekonomi perhatian, sehingga memengaruhi pengalaman informasi setiap individu secara berbeda.

Dengan demikian, rekonstruksi teori komunikasi harus mengakui algoritma sebagai aktor non-manusia yang memiliki kapasitas struktural dalam membentuk realitas sosial. Kehadiran algoritma mengubah dinamika gatekeeping tradisional menjadi algorithmic gatekeeping, di mana seleksi informasi dilakukan secara otomatis berdasarkan data perilaku pengguna. Dalam konteks disinformasi, sistem rekomendasi dapat memperkuat konten yang bersifat sensasional atau emosional karena dianggap mampu meningkatkan keterlibatan. (Tufekci, 2015) Oleh sebab itu, teori komunikasi perlu mengintegrasikan dimensi algoritmik sebagai bagian integral dari proses komunikasi.

Prinsip ketiga adalah penguatan dimensi literasi digital dan resistensi publik. Rekonstruksi teori komunikasi tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif-kritis. Dalam era disinformasi digital, kemampuan publik untuk mengenali, mengevaluasi, dan merespons informasi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas ruang publik. Literatur menunjukkan bahwa literasi digital dapat mengurangi kerentanan terhadap disinformasi dengan meningkatkan kemampuan analisis kritis dan verifikasi informasi. (Guess, Nagler, & Tucker, 2020) Oleh karena itu, teori komunikasi yang adaptif harus memasukkan literasi digital sebagai komponen strategis dalam model komunikasi kontemporer.

Ketiga prinsip tersebut menjadi fondasi bagi model komunikasi multidireksional berbasis jaringan yang diusulkan dalam penelitian ini. Model tersebut mencakup empat komponen utama yang saling berinteraksi secara simultan. Pertama adalah aktor manusia, yang meliputi individu, komunitas, influencer, dan kelompok kepentingan. Aktor manusia tetap menjadi subjek utama dalam produksi dan konsumsi makna, tetapi posisinya kini berada dalam struktur yang lebih kompleks.

Komponen kedua adalah aktor algoritmik, yang mencakup sistem rekomendasi, bot digital, artificial intelligence, serta mekanisme otomatisasi lainnya. Aktor algoritmik berfungsi sebagai mediator yang menentukan pola distribusi informasi. Dalam model ini, algoritma tidak dipandang netral, melainkan sebagai entitas yang beroperasi dalam kerangka ekonomi dan politik tertentu. Interaksi antara aktor manusia dan algoritmik membentuk dinamika sirkulasi informasi yang menentukan apakah suatu konten menjadi viral atau tidak.

Komponen ketiga adalah struktur platform. Platform digital menyediakan infrastruktur teknis sekaligus kerangka regulatif yang mengatur interaksi komunikasi. Kebijakan moderasi konten, desain antarmuka, serta sistem monetisasi memengaruhi cara informasi diproduksi dan dikonsumsi. Platform tidak hanya menjadi saluran, tetapi juga institusi yang memiliki kekuasaan dalam membentuk norma komunikasi publik. (Van Dijck et al., 2018)

Komponen keempat adalah konteks sosial-politik. Komunikasi digital tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dalam struktur sosial, budaya, dan politik tertentu. Polarisasi politik, krisis kepercayaan terhadap institusi, serta dinamika ekonomi digital turut memengaruhi penyebaran disinformasi. (Bennett & Livingston, 2018) Oleh karena itu, model rekonstruksi teori komunikasi harus mempertimbangkan faktor kontekstual sebagai bagian integral dari analisis.

Interaksi keempat komponen tersebut membentuk ekosistem komunikasi digital yang kompleks. Aktor manusia memproduksi dan membagikan konten, algoritma menentukan distribusinya, platform mengatur infrastrukturnya, dan konteks sosial-politik memberikan makna serta konsekuensi terhadap informasi tersebut. Model ini memperluas teori komunikasi klasik dengan memasukkan dimensi datafikasi, artificial intelligence, serta ekonomi perhatian sebagai variabel kunci dalam analisis komunikasi kontemporer. (Couldry & Mejias, 2019)

Secara epistemologis, rekonstruksi ini menandai pergeseran dari paradigma komunikasi berbasis media menuju paradigma komunikasi berbasis infrastruktur digital. Komunikasi tidak lagi dipahami semata sebagai pertukaran pesan, tetapi sebagai proses yang terintegrasi dengan sistem data dan algoritma yang membentuk struktur sosial. Dengan demikian, rekonstruksi teori komunikasi bukan sekadar pembaruan terminologis, melainkan kebutuhan epistemologis untuk memahami dinamika disinformasi digital secara lebih komprehensif.

Integrasi perspektif jaringan, algoritma, dan literasi digital memungkinkan teori komunikasi menjadi lebih adaptif terhadap tantangan komunikasi global di era platformisasi. Kerangka ini juga membuka ruang bagi pengembangan penelitian lanjutan yang menguji interaksi antara aktor manusia dan sistem algoritmik dalam berbagai konteks sosial-politik. Dengan demikian, teori komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai fondasi konseptual dalam merancang strategi mitigasi disinformasi dan memperkuat ketahanan ruang publik digital.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan komunikasi digital berbasis platform dan algoritma telah mengubah secara mendasar struktur komunikasi global. Disinformasi digital bukan sekadar persoalan konten yang salah, melainkan fenomena struktural yang lahir dari sistem komunikasi berbasis jaringan, datafikasi, dan artificial intelligence. Teori komunikasi dalam satu dekade terakhir mengalami pergeseran dari paradigma linear media massa menuju paradigma komunikasi jaringan yang multidireksional dan terdesentralisasi.

Namun demikian, teori komunikasi klasik seperti agenda setting, Two-step flow, dan spiral of silence memiliki keterbatasan dalam menjelaskan dinamika komunikasi berbasis algoritma. Asumsi tentang media terpusat dan aktor manusia sebagai pusat komunikasi tidak lagi sepenuhnya relevan dalam konteks platform digital yang dimediasi oleh sistem rekomendasi otomatis, bot, dan artificial intelligence.

Sebagai respons terhadap kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan kerangka rekonstruksi teori komunikasi yang bertumpu pada tiga prinsip utama: komunikasi jaringan, integrasi algoritma sebagai aktor non-manusia, dan penguatan literasi digital. Model yang diusulkan mencakup empat komponen utama aktor manusia, aktor algoritmik, struktur platform, dan konteks sosial-politik yang berinteraksi dalam membentuk sirkulasi informasi digital. Dengan demikian, rekonstruksi teori komunikasi merupakan kebutuhan epistemologis agar kajian komunikasi mampu menjelaskan secara lebih komprehensif dinamika disinformasi di era platformisasi dan algoritma.

Daftar Pustaka

- Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions. *European Journal of Communication*, 33(2), 122–139. <https://doi.org/10.1177/0267323118760317>
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The Logic of Connective Action. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739–768. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661>
- Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2019). The global disinformation order: 2019 global inventory of organised social media manipulation. Computational Propaganda Research Project. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3511313>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age* (2nd ed.). Polity Press.
- Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity Press. <https://doi.org/10.1017/9781316418345>
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press. <https://doi.org/10.1515/9781503609754>
- Forum, W. E. (n.d.). *Global risks report 2024*. World Economic Forum. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14330.90564>
- Guess, A. M., Nagler, J., & Tucker, J. (2020). Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook. *Science Advances*, 5(1), 4586. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aau4586>
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- McIntyre, L. (2018). *Post-Truth*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, 71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. New York: Penguin Press.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sunstein, C. R. (2018). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400890521>

- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Tufekci, Z. (2015). Algorithmic harms beyond Facebook and Google: Emergent challenges of computational agency. *Colorado Technology Law Journal*, 13, 203–218.
- Van Barneveld, R. J., Dunshea, F. R., Beddhu, S., Filipowicz, R., Chen, X. X.-W. X. X., Neilson, J. L., ... Meng, M. (2019). Bone Health in Gynecologic Cancers—does FOSAVANCE Help? *American Journal of Clinical Nutrition*, 10(1).
- Van Dijck, J., Poell, T., & De Waal, M. (2018). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/9780190889760.001.0001>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking. Council of Europe. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29943.85920>